

BAB I PENDAHULUAN

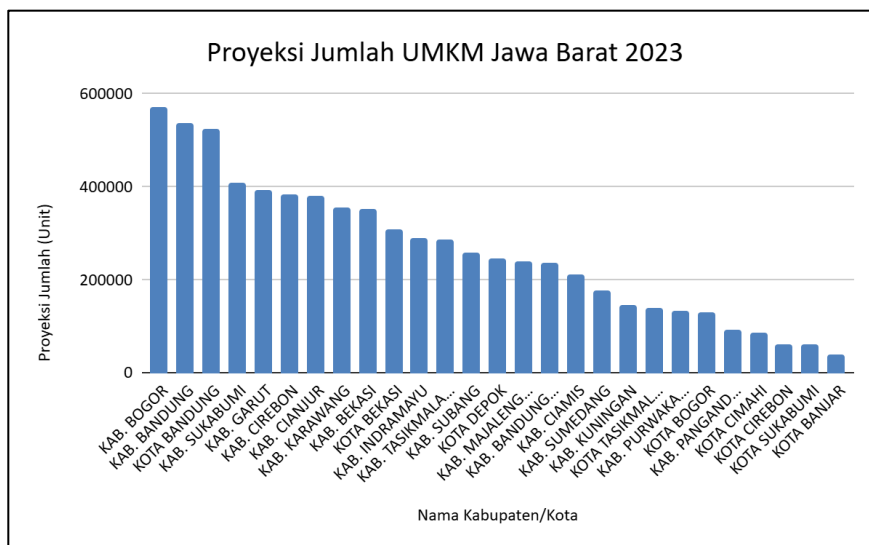
Pada Bab I Pendahuluan, dijelaskan latar belakang yang mengangkat peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital seperti QRIS, khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung. Bab ini juga merumuskan permasalahan utama yang akan diteliti, tujuan dari penelitian, batasan-batasan yang ditetapkan agar fokus penelitian tetap terjaga, dan manfaat yang diharapkan.

I.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia (Munthe, Yarham, & Siregar, 2023). Usaha ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian sekaligus sumber penyerapan tenaga kerja yang penting di Indonesia (Julianto, Pasek, & Wiguna, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2024, jumlah unit usaha UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 65 juta, yang menunjukkan tingginya peran sektor ini dalam struktur ekonomi nasional (Ramadani, Ramadhani, Ikrom, & Harahap, 2025). Secara kontribusi, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau setara dengan nilai ekonomi sebesar Rp9.580 triliun (Wati, Septianingsih, Wildan Khoeruddin, & Al-Qorni, 2024). Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), terdapat lebih dari 3,5 juta perusahaan industri skala mikro dan kecil di Indonesia, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yaitu mencapai sekitar 624.000 unit usaha.

Selain berperan dalam kegiatan ekonomi, UMKM juga menjadi sumber utama lapangan pekerjaan di Indonesia. Sekitar 97% tenaga kerja nasional bekerja di sektor ini, atau lebih dari 117 juta orang menggantungkan penghidupan mereka pada usaha mikro, kecil, dan menengah (Yolanda, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus mendukung UMKM, terutama usaha mikro, melalui kebijakan yang berpihak, kemudahan akses pembiayaan, serta pelatihan dan pendampingan agar UMKM

mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi dan perubahan zaman.



Gambar I-1. Proyeksi Jumlah UMKM Jawa Barat 2023
Sumber: (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2024)

Tak hanya itu, seperti yang terlihat pada Gambar I.1, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung menempati urutan tiga besar sebagai kabupaten atau kota dengan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Apabila digabungkan, maka angka tersebut tergolong tinggi dan menunjukkan peran penting UMKM dalam perekonomian wilayah Kota dan Kabupaten Bandung. Hal ini menegaskan peran penting UMKM, khususnya usaha mikro, dalam mendukung ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas wilayah sebagai pusat ekonomi kreatif dan inovatif. Jumlah yang tinggi ini juga membuka peluang besar untuk transformasi digital secara lebih masif.

Meskipun UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, pelaku usaha mikro masih menghadapi tantangan serius dalam aspek legalitas usaha, adopsi teknologi, akses pembiayaan, serta kapasitas manajerial. Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya usaha mikro (UMI), belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum mengikuti pelatihan bisnis, dan masih mengandalkan metode pemasaran konvensional. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dan tingginya risiko usaha yang umum ditemui pada usaha keluarga berskala kecil (Caballero-Morales, 2021). Oleh karena itu, perbaikan kebijakan yang bersifat transformasional diperlukan agar

UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Transformasi digital menjadi salah satu strategi kunci dalam mengatasi hambatan tersebut. Pemanfaatan platform daring, sistem pembayaran non-tunai, serta pemasaran berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan memperbaiki pencatatan keuangan. Penelitian Abdillah (2024) menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital secara signifikan meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, serta berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Inisiatif ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Salah satu bentuk digitalisasi yang relevan bagi UMKM adalah penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode pembayaran elektronik.

QRIS, sebagai standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, bertujuan menyatukan berbagai sistem pembayaran dari penyedia jasa pembayaran (PJSP). Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat inklusi keuangan. Data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menunjukkan peningkatan volume transaksi QRIS sebesar 104,6% pada periode Januari-Juni 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Setyaningsih & Putri, 2024). Pada Desember 2024, tercatat lebih dari 38,1 juta *merchant* telah mengadopsi QRIS, menunjukkan luasnya penetrasi dari sisi jumlah pengguna.

Namun demikian, angka adopsi yang tinggi belum sejalan dengan tingkat pemanfaatan aktual. Rata-rata transaksi QRIS per *merchant* hanya lima hingga sembilan kali per bulan, dengan nilai transaksi berkisar Rp500.000–Rp1.000.000 (Sastra & Asyari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM menjadikan QRIS sebatas formalitas administratif, bukan sebagai alat utama dalam kegiatan transaksi harian. Di sisi lain, perubahan preferensi konsumen yang kini lebih menyukai metode pembayaran digital karena alasan kenyamanan,

kecepatan, dan higienitas (Ika, 2020), menuntut UMKM untuk segera beradaptasi. Jika tidak, UMKM berisiko tertinggal dalam kompetisi pasar dan kehilangan segmen pelanggan yang mulai terbiasa dengan transaksi non-tunai.

Dalam konteks sistem informasi, hal ini menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) antara pelaku usaha dan konsumen. Padahal, QRIS bukan hanya alat pembayaran, melainkan juga pintu masuk menuju ekosistem digital yang lebih luas, meliputi pencatatan transaksi otomatis, pembukuan digital, akses pembiayaan mikro, hingga integrasi ke platform *e-commerce*. Oleh karena itu, penggunaan QRIS secara aktif dan berkelanjutan perlu didorong sebagai bagian dari strategi transformasi digital UMKM.

Aspek sosial pun memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi QRIS. Perilaku rekan bisnis, komunitas, dan kompetitor dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam keputusan UMKM mengadopsi teknologi baru. Sebagai contoh, jika pelaku usaha di lingkungan sekitar belum menggunakan QRIS, pelaku lainnya cenderung tidak merasa terdorong untuk mengikuti. Meskipun promosi penggunaan QRIS cukup menarik, budaya penggunaan uang tunai masih kuat di kalangan UMKM (Butarbutar, Grace, Putra, Loist, & Sudirman, 2022). Selain itu, persepsi terhadap keamanan transaksi serta kemudahan penggunaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan teknologi ini.

Untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan QRIS oleh UMKM, penelitian ini menggunakan model *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menekankan bahwa sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan penentu utama dalam pembentukan niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini, variabel eksternal seperti persepsi keamanan (*security*) dan persepsi keuntungan relatif (*perceived relative advantage*) juga diintegrasikan guna memperkuat model dalam mengkaji konteks adopsi teknologi oleh UMKM.

Analisis dilakukan menggunakan *R Programming* melalui perangkat lunak RStudio dengan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), karena kemampuannya dalam mengolah data kuantitatif, terutama

pada model yang kompleks dan ukuran sampel yang moderat. PLS-SEM dipilih karena lebih sesuai untuk tujuan penelitian yang bersifat prediktif dan eksploratif, seperti dalam studi ini yang berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM. Pendekatan ini juga lebih toleran terhadap distribusi data yang tidak normal serta memungkinkan analisis yang tetap valid meskipun jumlah responden tidak terlalu besar (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2022). Teknik bootstrapping dan path analysis digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk secara empiris. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan, strategi edukasi, serta pengembangan sistem pembayaran digital yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan ini diturunkan ke sub-permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Bandung mempengaruhi niat mereka dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran?
- b. Bagaimana persepsi terhadap keamanan dan keunggulan relatif memengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta secara tidak langsung memengaruhi niat pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Bandung dalam mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Bandung dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital.
- b. Mengidentifikasi pengaruh persepsi terhadap keamanan dan keunggulan relatif terhadap sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta

pengaruh tidak langsungnya terhadap niat pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Bandung dalam mengadopsi QRIS.

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan untuk memastikan fokus dan keakuratan hasil yang diperoleh. Dengan menetapkan batasan-batasan ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Adapun batasan-batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melibatkan pelaku UMKM di wilayah Bandung yang telah mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran. Pelaku UMKM yang tidak memiliki akses atau tidak tertarik dengan teknologi pembayaran digital QRIS tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Data yang diolah pada penelitian ini terbatas pada data usaha mikro (UMI) di Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran. Data di luar UMI tidak akan digunakan saat tahap pengolahan dan analisis data.
3. Penelitian ini menggunakan Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai kerangka teoritis utama yang berfokus pada niat perilaku (*behavioral intention*), sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) pelaku UMKM di wilayah Bandung yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran di usahanya.
4. Penelitian ini menggunakan keamanan (*security*) dan keunggulan relatif yang dirasakan (*perceived relative advantage*) sebagai variabel tambahan yang ditambahkan pada model TPB.
5. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

6. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) dengan menggunakan Google Form.
7. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS serta bahasa pemrograman R yang dijalankan melalui RStudio.
8. Penelitian ini menggunakan skala *Likert* dengan jenis skala ordinal untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator yang digunakan dalam model penelitian. Skala ordinal digunakan karena data yang dihasilkan merepresentasikan tingkat kecenderungan atau urutan penilaian, bukan besaran yang memiliki jarak numerik yang pasti antar kategori.
9. Penelitian ini dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Oleh karena itu, cakupan penelitian tidak mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerimaan QRIS.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan konteks penelitian, antara lain:

1. Bagi pelaku UMKM, terutama UMI, penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan QRIS, sehingga dapat mendorong kesiapan dan motivasi untuk mengadopsi QRIS guna meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih lanjut penerimaan teknologi pembayaran digital di kalangan UMKM, serta memperkaya literatur dan pengembangan metode serupa.
3. Bagi pemerintah dan Bank Indonesia, penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi adopsi QRIS oleh UMKM, yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif.

4. Bagi industri keuangan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta mendorong kolaborasi strategis antara penyedia layanan dan pelaku usaha.

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, batasan ruang lingkup penelitian, manfaat yang diharapkan, serta gambaran umum sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, termasuk teori utama yang digunakan (*Theory of Planned Behavior*), serta variabel eksternal yang mendukung. Disertakan pula hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan analisis perbandingan metodologi/metode/kerangka kerja untuk mendukung pemilihan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci tahapan dan strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari penyusunan model konseptual, sistematika penyelesaian masalah, perancangan instrumen, teknik pengumpulan data, proses pengolahan dan analisis data, hingga alasan pemilihan metode PLS-SEM menggunakan R dan SmartPLS.

Bab IV Penyelesaian Masalah

Bab ini membahas tahap pengolahan data yang dilakukan untuk menguji model penelitian menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan paket SEMinR pada RStudio.

Bab V Hasil dan Evaluasi

Bab ini menyajikan pembahasan hasil analisis deskriptif dan inferensial dari seluruh variabel yang diteliti. Disampaikan pula analisis reliabilitas, validitas, structural model, serta pengujian hipotesis dari keseluruhan model. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil terhadap tujuan penelitian.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Disampaikan pula saran yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun penerapan di dunia usaha atau kebijakan publik.